



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk propinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk Propinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Makna pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.<sup>1</sup> Kecamatan juga mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Seorang Camat dalam menjalankan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Melalui pengertian ini bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi seiring tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasa 11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pemerintah Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari Pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/2005 tentang Desa, dalam PP ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah:

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri yang mengambil bagian dari pengambil keputusan.
  - Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, karena dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
  - Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan dan penyelewengan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyebutkan pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan<sup>2</sup>.

Selanjutnya penggunaan Alokasi Dana Desa adalah diperuntukan untuk :

- Belanja Rutin dan Operasional Kepala Desa beserta perangkat, BPD dan Lembaga desa yang di akui dan dibentuk Desa.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik.

Belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat, Badan Pemberdayaan Desa dan lembaga desa dan diakui dan dibentuk dan dibina oleh desa, supaya tidak terjadi kesimpangsiuran setiap belanja operasional harus ada yang mengawasinya agar semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut tabel yang menjelaskan belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat di Desa Simpang Petai yaitu:

---

<sup>2</sup>Peraturan Bupati Kampar No 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa. Pasal 2



**Tabel I.1 Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Untuk Belanja Pegawai beserta perangkat Tahun 2016**

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)
1	Tunjangan Penghasilan Ketua BPD	Rp. 30.000.000
2	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Rp. 5.700.000
3	Tunjangan Hari Raya Sekretaris Desa	Rp. 4. 500.000
4	Tunjangan Hari Raya Kepala Urusan	Rp. 14.400.000
5	Tunjangan Hari Raya Kepala Dusun	Rp. 6.000.000
6	Biaya Operasional Rukun Warga	Rp. 40.000.000
7	Biaya Operasional Rukun Tetangga	Rp. 23.000.000
8	Biaya Operasional Kantor Desa	Rp. 66.977.568
9	Belanja Operasional LPM	Rp.6.500.000
10	Belanja Operasional PKK	Rp.4.000.000
11	Belanja Operasional POSYANDU	Rp. 14.400.000
12	Belanja Operasional Pemuda Dan Olahraga	Rp. 4.000.000
13	Biaya Operasional Linmas	Rp. 26.000.000
14	Kegiatan Pemerintah Desa Yang Dipandang Sangat Perlu (PILKADES)	Rp. 30.500.000
Jumlah		Rp.275.977.568

*Sumber Kantor Desa Simpang Petai, 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa Simpang Petai lebih banyak diperuntukkan kepada pembiayaan operasional kantor desa setiap tahunnya yaitu sebanyak Rp. 66.977.568 pada tahun 2016 lebih besar pada biaya atau belanja yang lainnya, dan kegiatan pemerintah desa yang dipandang sangat perlu, hal itu menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal yang dinyatakan belum perlu atau penting belum terselesaikan, karena masih banyak pembangunan desa. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik terdiri atas:

- Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- Teknologi tepat guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
  - f. Pengembangan sosial dan budaya
  - g. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa
  - h. Dan sebagainya yang dianggap penting yakni menjadi prioritas desa dan merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.

Kebijakan umum program pemberdayaan desa/kelurahan merupakan pengertian dari Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 dan bentuk implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar. Prinsip dasar kebijakan program pemberdayaan desa melalui Alokasi Dana Desa dalam rangka otonomi menuju desa mandiri adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek pembangunan
- b. Pemerataan pengalokasian dana dan kegiatan pembangunan keseluruhan Desa/Kelurahan sehingga tidak ada lagi yang tidak tersentuh oleh pembangunan
- c. Menciptakan peluang kerja untuk memperkecil pengangguran
- d. Menciptakan bertambahnya uang yang beredar di pedesaan

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berikut ini rincianbeberapa belanja operasional kantor beserta perangkatnya dalam penggunaan alokasi dana desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio JayaKabupaten Kampar untuk operasional kantor Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.2 Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Untuk Operasional Kantor Desa dan Perangkat Simpang Petai Tahun 2016**

No.	Uraian Operasional Kantor dan Perangkat	Anggaran (Rp)
1	Belanja Barang Dan Jasa	55.277.568
2	Belanja Modal	11.700.000
3	Kegiatan Operasional BPD	30.000.000
4	Kegiatan Operasional RT/RW	63.000.000
5	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	26.000.000
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	6.500.000
<b>Total</b>		<b>192.477.568</b>

Sumber : Kantor Desa Simpang Petai, 2016

Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Untuk Operasional Kantor dan perangkat Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya menjelaskan berdasarkantabel diatas bahwa jumlah Tahun 2016 yaitu; untuk Belanja Barang Dan Jasa Rp.55.277.568, untuk Belanja Modal Rp. 11.700.000, untuk Pakaian Dinas Rp.3.500.000, untuk Alat dan Bahan Kebersihan Rp. 812.000, untuk Perjalanan Dinas Rp.15.600.000, untuk Pemeliharaan Rp. 1.400.000, untuk Kegiatan Operasional BPD Rp. 30.000.000, untuk Kegiatan Operasional RT/RW Rp.63.000.000, untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.26.000.000 Dua (Puluh Enam Juta Rupiah), untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara penulis dengan beberapa masyarakat ditemukan indikasi yaitu dalam penggunaan ADD di desa yang terdapat di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya lebih diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang di akui desa, padahal seharusnya lebih diperuntukkan kepada pembangunan desa untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa di desa terutama untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat terlalu sedikit bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya setempat sehingga banyak program-program untuk masyarakat tidak berjalan seperti bidang olahraga yang tidak berjalan karena tidak tersedianya perlengkapan olahraga dan kurangnya pembangunan yang dilakukan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya dalam pembangunan Drainase dan Jalan yang seharusnya telah menjadi kewajiban dari pemerintah desa, hal itu terlihat masih banyaknya yang belum di semenisasi oleh pemerintah desa sehingga jalan yang di lalui masyarakat selalu susah ditempuh apabila ada hujan, juga bagi jalan yang telah di drainase sekarang sudah seharusnya di perbaiki karena sudah banyak yang hancur dan berlobang yang membuat masyarakat kurang nyaman dengan keadaan jalan tersebut.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini di fokuskan pada “Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Umum Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar “. Dengan Sub Fokus adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
- b. Apa saja hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian tersebut untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian harus sejalan terhadap judul dan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari pengajuan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan Ilmu Penulis dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama buat Jurusan Administrasi Negara.
- b. Untuk menambah daftar bacaan pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai masukan dengan penelitian sejenis.
- d. Agar penelitian yang berikutnya yang sejenis untuk dapat melakukan pengkajian ulang tentang penelitian ini.

## 1.6

### Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan penjejelasan dari latar belakang sampai kesimpulan yang terbentuk kedalam 6(enam) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai masalah penenelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang membahas mengenai teori-teori atau konsep,hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran hipotesis yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitianyang berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisa data yang dikumpulkan.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Keadaan Umum Desa Simpang Petai, Geografi Kelurahan Simpang Baru, Demografi, Sejarah, kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Desa Simpang Petai serta Struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

Stat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi Desa Simpang Petai.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hal penting dalam sebuah skripsi, Dalam Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.